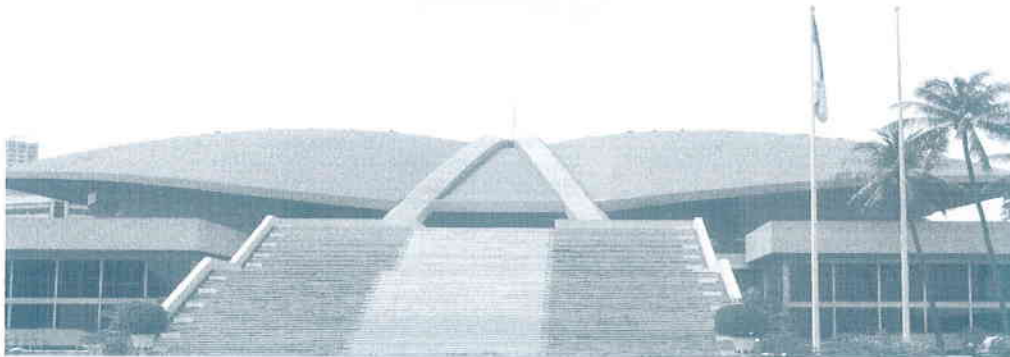




**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
KE NEGARA REPUBLIK FEDERASI JERMAN
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2011-2012
21 S.D 27 APRIL 2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, MEI 2012



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Republik Federasi Jerman dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor : 77/PIMP/III/2010-2011, tanggal 13 April 2012, dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara, Indonesia - Jerman, peningkatan kerjasama *Parliament to Parliament*, dan kerjasama di bidang industri pertahanan serta dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas keberadaan Atase-atase teknis di kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta sejauhmana pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI, serta mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas keberadaan Atase-atase teknis di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program Pemerintah.
2. Berkaitan dengan Bidang Tugas Komisi I DPR RI di luar negeri, Komisi I DPR RI mempunyai kewajiban untuk membina hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di dunia, khususnya kerja sama antar parlemen, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral dengan misi utama yang diemban adalah untuk memajukan Kepentingan Nasional Indonesia dalam kancah pergaulan antar bangsa di dunia, selain itu pula menjalankan misi *second track diplomacy* dengan melakukan pertemuan dengan Parlemen dan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Republik Federal Jerman, serta berpartisipasi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, dan melaksanakan prinsip politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Disamping itu, berkaitan dengan Ruang Lingkup Komisi I DPR RI di bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI juga perlu mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerjasama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat, termasuk dalam hal ini kunjungan Komisi I DPR RI ke Jerman.

C. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman terlampir.
(lampiran 1)

BAB II

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE REPUBLIK FEDERAL JERMAN 22 - 26 APRIL 2012

Dalam rangka persiapan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Jerman, Delegasi dalam hal ini, di Wakili Ketua Delegasi Komisi I DPR RI, telah melakukan pertemuan guna mendapatkan perkembangan informasi, antara lain :

- A. Pertemuan dengan Dubes Republik Federal Jerman (RFJ), H.E. Dr. Norbert Baas, Jakarta guna meningkatkan hubungan ke-2 negara, Indonesia - Jerman.
- B. Komunikasi dengan Sekjen Kemlu RI, Budi Bowoleksono, Dubes RI di Jerman serta Dubes RI di Belanda untuk mendapatkan informasi terkait rencana kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman.

Adapun Pertemuan-pertemuan Delegasi Komisi I DPR RI di Munich & Berlin, Jerman, yakni :

1. **Pertemuan di *Kraus Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, Pabrik MBT Leopard, Munich***, Mr. Frank Haun, Presiden dan CEO KMW dan Mr. Christian Goettfert, Managing Director KMW, (23 April 2012, Pukul : 10.00)

Pada pertemuan dengan pihak KMW, Delegasi Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan mengenai beberapa produk unggulan KMW, antara lain *All Terrain Vehicle "Dingo"*, *Multi Role Armored (MRAV) "Boxer"* yang banyak digunakan di Afganistan. Selain itu, juga mendapatkan pemaparan khusus mengenai tank Leopard 2.

Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa berkaitan dengan ruang lingkup Komisi I DPR RI di bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung Pemerintah RI di bidang pertahanan sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.

Untuk itu, Komisi I DPR RI memandang perlu mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerjasama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat, dalam hal ini dengan Republik Federal Jerman (RFJ) yang dikenal sebagai salah satu produsen alutsista yang maju di kawasan Eropa.

Selanjutnya, Delegasi Komisi I DPR RI menanyakan mengenai kecocokan tank tersebut dengan situasi dan kondisi spesifik yang ada di Indonesia, yaitu air, sungai, danau, dan terputus-putus. Pimpinan KMW menjelaskan bahwa tank Leopard 2 dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan negara pengguna. Bila ditinjau dari kemampuannya, tank Leopard 2 dapat beroperasi di dalam air sampai ke dalaman 4 meter, serta dapat dilengkapi dengan jembatan lipat jenis "Leguan" yang antara

lain telah dipergunakan oleh angkatan bersenjata Malaysia. Jangkauan jembatan lipat tersebut adalah 26 meter atau dua kali 14 meter. Jika Indonesia jadi membeli Leopard 2, maka pihak KMW mengharapkan mendapatkan kebutuhan tambahan peralatan untuk menyesuaikan dengan medan di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Komisi I DPR RI memberikan penjelasan membicarakan peninjauan pembelian tank Leopard dan perjanjian *transfer of technology (ToT)* sebagai bagian dari rencana kontrak pembelian tersebut.

Menjawab pertanyaan Komisi I DPR RI mengenai pentingnya perjanjian *transfer of technology* jika Indonesia jadi membeli tank Leopard 2 dari Jerman, pihak KMW menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat antara Indonesia dengan KMW. Beberapa negara yang membeli tank Leopard dari KMW, seperti Kanada, dan Yunani memiliki perjanjian *transfer of technology*, sementara dengan Swiss dan Spanyol, KMW memiliki perjanjian lisensi. Khusus dengan Yunani, selain memiliki perjanjian *transfer of technology*, KMW juga membangun infrastruktur produksi di negara tersebut.

Selanjutnya, menurut pihak KMW, perjanjian pembelian tank Leopard 2 dan *transfer of technology* membutuhkan dua prasyarat yang harus dipenuhi oleh pihak Indonesia yaitu perjanjian untuk tidak menjual lagi tank ke negara lain, kecuali mendapatkan ijin dari Jerman. Selain itu harus ada perjanjian bahwa teknologi yang dialihkan tidak akan di bagi dengan negara-negara tertentu yang sensitif.

Lebih lanjut, pihak KMW menjelaskan bahwa rencana pembelian tank Leopard oleh Indonesia dari Belanda tetap harus mendapatkan ijin dari Jerman, setelah pembelian tersebut, Indonesia masih harus melakukan modifikasi sesuai kebutuhan medan di Indonesia. Hal tersebut hanya dapat dilakukan di Jerman, selain itu Belanda tidak dapat memberikan perjanjian *transfer of technology*.

2. Pertemuan dengan **Juru Bicara Luar Negeri**, Fraksi Koalisi Pemerintah CDU/CSU, Berlin, Mr. Philipp Missfelder, MdB (23 April 2012, Pukul 18.00)

Ketua Delegasi, Hayono Isman didampingi oleh Duta Besar RI untuk Jerman, Dr. Eddy Pratomo, dalam pertemuan ini, Bapak Hayono Isman menjelaskan salah satu maksud kunjungan Komisi I DPR RI ke Jerman adalah untuk turut menggalang dukungan dari pihak Jerman dalam hal pengadaan alutsista.

Selain itu, juga diujungi dukungan Parlemen Jerman mengenai kemungkinan perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan paspor dinas antara Indonesia dan Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, Mr. Missfelder menjelaskan bahwa memang ada kehati-hatian Pemerintah Jerman dalam melakukan ekspor alutsista ke luar negeri. Hal ini karena sebelumnya Pemerintah Jerman mendapatkan kecaman dari masyarakat Jerman akibat penjualan tank Leopard ke Saudi Arabia tahun 2011 dan penjualan senjata ke Angola tahun 2009. Namun demikian, missfelder melihat bahwa Indonesia berbeda dari kedua negara tersebut. Indonesia dipandang sebagai mitra potensial dalam bidang ekonomi dan strategis di Asia Tenggara.

Mr. Missfelder menjelaskan bahwa sebelum ini telah melakukan kunjungan ke Indonesia bersama Volker Kauder, MdB, Ketua Fraksi CDU/CSU di Parlemen Jerman Tahun 2010. Kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang demokratisasi dan ekonomi sangat mengesankan. Reformasi Indonesia dianggap dapat dijadikan model untuk transformasi di Timur Tengah yang saat ini sedang berlangsung. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Hayono Isman menyampaikan undangan kepada Mr. Missfelder untuk sekali lagi mengunjungi Indonesia, dan beliau merespon dengan baik, dan menurut rencana Mr. Missfelder akan mengunjungi Indonesia dalam musin panas tahun 2012.

3. Pertemuan **Rapat Dengar Pendapat dengan Dubes RI**, Dr. Eddy Pratomo, Konjen RI Frankfurt, Damos Dumoli Agusman, Konjen RI Hamburg, Marina Estella Anwar Bey, dan Seluruh Staf KBRI di Berlin (24 April 2012, Pukul : 10.10)

Dijelaskan oleh Duta Besar RI untuk RFJ, Dr. Eddy Pratomo tentang pelaksanaan tugas KBRI di Jerman, antara lain :

- Diplomasi ekonomi memiliki indeks kegiatan yang lebih tinggi dari pada diplomasi politik, selain kedekatan politik sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, sesuai arahan dari Menteri Luar Negeri RI.
- Rencana KBRI akan membangun Gedung KBRI baru di Berlin yang dibeli pada tahun 2007 berlantai 4, dimana saat ini KBRI masih menyewa gedung kantor. Status pembangunan gedung KBRI Berlin yang baru masih dalam proses penyesuaian design dengan anggaran yang tersedia.
- Dijelaskan pula koordinasi Dubes dengan para atase teknis berjalan dengan baik. Mekanisme koordinasi dilakukan antara lain melalui pertemuan langsung dengan Kepala Perwakilan dan Koordinator Fungsi lainnya, serta penyelenggaraan rapat staf mingguan yang dihadiri oleh seluruh staf termasuk para Atase Teknis. (Atase Teknis di KBRI : Atase Pertahanan, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Imigrasi, Atase Perdagangan, dan juga seorang Pejabat BIN).
- Selanjutnya koordinasi antara Dubes dengan para Atase Teknis dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 dan Keputusan Menlu RI No. 6 Tahun 2004.

Komisi I DPR RI mendukung rencana KBRI dalam membangun gedung KBRI di Berlin yang lokasinya dekat dengan Kedutaan Jepang, mengingat lokasi KBRI Berlin saat ini berada di sebelah hostel serta dekat dengan penjara wanita, hal ini dirasa kurang representatif sebagai kantor Perwakilan RI di Berlin. Kondisi gedung yang membaaur dengan lingkungan sekitar, menyulitkan upaya pengamanan gedung dan staf KBRI Berlin, serta rawan penyadapan. Selain itu pula, Komisi I DPR RI menggarisbawahi pentingnya Pemerintah untuk segera membangun gedung KBRI yang baru dengan dana yang memadai, sesuai dengan standar pembangunan gedung di Jerman; sinergi antara seluruh unsur Perwakilan RI, pengamanan dokumen dan persandian, serta sistem penggajian lokal staf yang masih dibawah standar Jerman.

Lebih lanjut, Dubes RI di Berlin Dr. Eddy Pratomo mengatakan bahwa kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman kali ini penting karena tahun ini adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman. Kedua negara sepakat untuk membentuk suatu Kemitraan yang mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk kemitraan antar Parlemen kedua negara. Menurut rencana dokumen Kemitraan ini akan diluncurkan saat kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia, pertengahan tahun 2012.

4. Pertemuan dengan **Ketua Komisi Pertahanan Parlemen Jerman**, Hon. Mrs. Susanne Kastner, MdB (24 April 2012, Pukul : 17.30)

Pada pertemuan ini, Ketua Delegasi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan peremajaan alutsista. Tujuan peremajaan tersebut bukan untuk menciptakan instabilitas di dalam negeri, maupun di kawasan, namun merupakan upaya untuk meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Indonesia mengharapkan Parlemen Jerman dapat memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Mrs. Kastner menjelaskan bahwa pihak Jerman mengharapkan kerja sama pertahanan tidak hanya terbatas pada ekspor alutsista tetapi juga pada pendidikan, pelatihan, dan pertukaran personil. Modernisasi persenjataan yang dilakukan oleh Indonesia biasa dilakukan dalam suatu negara demokratis, asal tidak bertujuan agresi. Dalam hal ini Parlemen Jerman akan mendukung upaya Indonesia tersebut, dan akan menyampaikan ke Kementerian-kementerian terkait.

Dalam bidang penanganan terorisme, Indonesia dapat dijadikan contoh, dan Jerman menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang tersebut.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPR RI dan Komisi Pertahanan Parlemen Jerman juga saling bertukar pikiran mengenai reformasi angkatan senjata. Saat ini Jerman sedang melaksanakan reformasi Angkatan Bersenjata dengan konsep : kecil, fleksibel, dan

mendukung operasi di luar negeri dengan memanfaatkan teknologi tinggi.

5. Pertemuan dengan **Parliamentary State Secretary Kementerian Ekonomi dan Teknologi Republik Federal Jerman**, Hon. Mr. Hans-Joachim Otto, (25 April 2012, Pukul : 09.15)

Dalam pertemuan ini Delegasi Komisi I DPR RI meminta dukungan terhadap rencana peremajaan Alutsista oleh Indonesia, mengingat kementerian tersebut merupakan lembaga yang paling menentukan dalam pemberian lisensi ekspor (*export license*) persenjataan di Jerman. Selain itu, Delegasi Komisi I DPR RI juga ingin mendapatkan informasi mengenai system ekspor alutsista Jerman.

Dalam keterangannya, Mr. Otto menjelaskan bahwa Jerman memandang Indonesia sebagai negara yang stabil dan demokratis. Indonesia juga dianggap sebagai stabilisator kawasan dan penting sebagai mitra Jerman dalam kerja sama ekonomi.

Berkaitan dengan ekspor alutsista dari Jerman, Kementerian Ekonomi tidak melihat adanya masalah atau hambatan, namun kiranya dapat dipahami oleh pihak Indonesia bahwa penjualan alutsista oleh Jerman tunduk terhadap hukum nasional dan rejim penjualan persenjataan Uni Eropa dan perjanjian Internasional.

Hal inilah menyebabkan ekspor persenjataan ke negara ketiga bersifat restriktif. Kebijakan ketat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia secara khusus tetapi kepada seluruh negara di luar NATO, Uni Eropa, dan negara setara NATO (Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru). Pihak Jerman meminta pemahaman Indonesia bahwa dengan tidak adanya perjanjian militer antara kedua negara, maka ekspor alutsista ke Indonesia harus diberikan dengan mengkaji secara *case by case*.

Lebih lanjut lagi, Ketua Delegasi dalam pertemuan dengan Kementerian Ekonomi menyampaikan harapan sekiranya dengan alokasi dana yang sama dengan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda, Indonesia mendapatkan jumlah Tank Leopard yang sama juga dari Jerman tidak hanya 44 buah tank tapi sama dengan yang ditawarkan Belanda yaitu sekitar 80 -100 buah.

6. Pertemuan dengan **State Secretary Kementerian Luar Negeri RFJ**, (*Auswartiges Amt*), Hon. Mrs. Cornelia Pieper, (25 April 2012, Pukul :11.00)

Pada pertemuan ini, Delegasi Komisi I DPR menyampaikan penghargaan atas keinginan pihak Jerman untuk meningkatkan hubungan bilateral menuju suatu kemitraan kedua negara. Delegasi

Komisi I DPR RI juga mendapatkan masukan positif terhadap keinginan Indonesia untuk membeli alutsista dari Jerman, selain itu Delegasi juga menyambut baik rencana kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia pada bulan Juli tahun 2012.

Menanggapi hal tersebut, State Secretary Kemlu Jerman juga menegaskan bahwa Jerman mendukung peremajaan alutsista Indonesia dan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Mrs. Pieper menggarisbawahi bahwa selama ini Jerman selalu mendukung Indonesia antara lain dengan menyumbang *tsunami warning system* yang dinilainya berhasil.

Menyinggung mengenai prosedur visa di Kedutaan Jerman di Jakarta, Ketua Delegasi Komisi I DPR RI menyampaikan penghargaan atas kebijakan Jerman untuk mempermudah aplikasi visa bagi WNI yang akan berkunjung ke Jerman. Namun begitu pada prinsipnya Komisi I DPR RI mengharapkan agar Uni Eropa dapat mengubah posisi Indonesia dalam *Schengen Protocol* dimana pada saat ini Indonesia masih berada dalam negara-negara di Annex 1 dimana untuk kunjungan WNI ke Uni Eropa masih memerlukan visa untuk masuk kedalam negara-negara di Annex 2 (bersama-sama dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand), dimana WNI yang berkunjung ke Uni Eropa tidak lagi memerlukan visa kunjungan.

Hal ini memperlihatkan secara konkrit kedekatan hubungan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai kemungkinan pembuatan perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas antara kedua negara.

Delegasi Komisi I DPR RI menyambut baik semangat yang telah terjalin hubungan 60 tahun Indonesia-Jerman. Jerman sebagai negara yang terbesar dan berpengaruh secara ekonomi di Uni Eropa, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN. Lebih lanjut diupayakan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, rencana kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia, bulan Juli 2012, serta Kemitraan Indonesia dan Jerman.

Disampaikan pula apresiasi atas kerja keras Dubes RI di Berlin, dan juga Dubes Jerman, di Jakarta yang telah bekerja dengan baik dalam rangka peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam hal ini, KBRI Indonesia telah mampu memberikan visa untuk warga negara Jerman dalam waktu 1 jam, sementara visa untuk warga Indonesia yang hendak ke Jerman dapat dipercepat dari 14 hari menjadi 3 hari.

Menanggapi hal tersebut, Mrs. Pieper menjelaskan bahwa Kemlu Jerman telah mengajukan untuk visa diplomat bebas visa, dan untuk paspor dinas akan diupayakan dikarenakan masih ada hal-hal yang masih harus diselesaikan.

7. Pertemuan Hayono Isman dengan Beberapa Anggota Parlemen Belanda dan menghadiri Undangan *Indonesia Migrant Worker Union (IMWU)* di Den Haag.

Dalam rangka kunjungan ke negara Jerman, Ketua Delegasi, Bapak Hayono Isman berkesempatan pula singgah di negara Belanda dan mengadakan pertemuan dengan beberapa Parlemen Belanda dan menghadiri Undangan *Indonesia Migrant Worker Union (IMWU)* di Den Haag, yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Belanda, Retno L.P. Marsudi dan Atase Imigrasi RI, dalam kesempatan tersebut para pekerja migran Indonesia menyampaikan permasalahan yang dihadapi berupa penipuan oleh agen perjalanannya sehingga dianggap sebagai pekerja illegal, selain itu pula meminta agar SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) sebagai identitas diri pekerja diganti dengan paspor.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua menyarankan kepada Atase Imigrasi RI untuk secepatnya melaporkan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk di ubah aturannya agar para pekerja migran mendapat paspor yang legal dan tidak dapat dikategorikan kriminal, dan mereka ingin mencari pekerjaan layak, sehingga para pekerja migran Indonesia berhak mendapat paspor.

Selain pertemuan dengan pekerja migran di Den Haag, Hayono Isman juga melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota Parlemen Belanda, dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta dukungan dari Parlemen Belanda terhadap keberadaan pekerja Indonesia di Belanda.

Lebih lanjut, Anggota Parlemen Belanda menyampaikan keinginannya untuk dapat berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat guna mempererat hubungan kedua negara yang sempat terganggu karena batalnya Kunjungan Presiden RI ke Belanda beberapa waktu lalu.

Demikian Laporan Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Republik Federasi Jerman dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Diharapkan hasil kunjungan tersebut dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada DPR RI dan Pemerintah RI.

Jakarta, 15 Mei 2012
Ketua Delegasi

TTD

H. Hayono Isman, S.IP
A-450

**DAFTAR DELEGASI KOMISI I DPR RI
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KE JERMAN
22-26 APRIL 2012**

1. H. Hayono Isman, S.IP	F-PD	Ketua Delegasi
2. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	F-PD	Anggota Delegasi
3. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga	F-PD	Anggota Delegasi
4. Vena Melinda, SE	F-PD	Anggota Delegasi
5. Drs. Guntur Sasono, M.Si	F-PD	Anggota Delegasi
6. Drs. H. Muchamad Ruslan	F-PG	Anggota Delegasi
7. Ir. Neil Iskandar Daulay	F-PG	Anggota Delegasi
8. Yorrays Raweyai	F-PG	Anggota Delegasi
9. H. Tritamtomo, SH	F-PDI P	Anggota Delegasi
10. Ir. Heri Akhmadi	F-PDI P	Anggota Delegasi
11. Luthfi Hasan Ishaq, MA	F-PKS	Anggota Delegasi
12. Jaka Adiwiguna, M.AP	Set. Komisi I	Sekretariat Del.
13. Suparno	Set. Komisi I	Sekretariat Del.
14. Agung Kurniadi	-	Kemlu RI